



**RENCANA KERJA  
PUSAT PENYULUHAN  
TAHUN 2020**

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



PUSAT PENYULUHAN

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT PENYULUHAN**

NOMOR : /LUH/PP/KEU.0/12/2019  
TENTANG

**RENCANA KERJA PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KEPALA  
PUSAT PENYULUHAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Penyuluhan yang efektif dan efisien guna mendukung pencapaian target kinerja pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2020, diperlukan Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2020 yang terarah, terukur dan berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2020 dengan Peraturan Kepala Pusat Penyuluhan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan.
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/menlhk/setjen/kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
14. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Nomor P.5/P2SDM/SET/REN.0/12/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Renja BP2SDM Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN TENTANG RENCANA KERJA PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2020.

**Pasal 1**

Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

**Pasal 2**

Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2020 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan kegiatan Peningkatan Penyuluhan Tahun Anggaran 2020.

**Pasal 3**

Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal Desember 2019

**Kepala Pusat,**



**Ir. Mariana Lubis, MM**  
**NIP. 19621112 1991012001**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahun 2020 merupakan penjabaran kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 sesuai dengan arahan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Rencana Kerja ini bertujuan untuk mengsinkronisasikan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berikutnya sesuai dengan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Sasaran yang ingin dicapai pada Rencana Kerja Tahun 2020 yaitu meningkatnya jumlah pendamping (Penyuluh Kehutanan) yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu: tersedianya 200 orang pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok masyarakat, terbentuk dan berkembangnya 120 unit Kelompok Tani Hutan Mandiri dan tersedianya 4 jenis metode penyuluhan kehutanan yang diimplementasikan. Ketiga IKK tersebut selanjutnya diuraikan dalam Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2020 Satker Pusat Penyuluhan dengan mengacu pada Peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Setjen/Rokeu/Keu.1/8/2019 Tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2020 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Kerja tahun 2020 ini difokuskan pada penyesuaian rencana 5 (lima) tahun kedepan dan optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada periode RPJMN sebelumnya. Pencapaian kinerja tahun 2018 dan tahun sebelumnya menjadi pijakan sekaligus perbaikan dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

Akhirnya, semoga Renja ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2020 dan Satker Pusat Penyuluhan dapat memenuhi setiap kinerja yang telah dirumuskan dan mencapai sasaran pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, Desember 2019  
Kepala Pusat,



Ir. Mariana Lubis, MM  
NIP. 19621112 199101 2 001

# DAFTAR ISI

|   | Halaman   |
|---|-----------|
| Peraturan Kepala Pusat Penyuluhan .....   | i         |
| Kata Pengantar .....  | iii       |
| Daftar Isi .....  | iv        |
| Daftar Gambar .....   | v         |
| Daftar Tabel .....  | vi        |
| Daftar Lampiran .....   | vii       |
| <br>  |           |
| <b>I. PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....  | 1         |
| B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....  | 2         |
| C. Struktur Organisasi dan SDM .....  | 5         |
| <b>II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018.....</b>                 | <b>6</b>  |
| A. Capaian Tahun 2018.....  | 6         |
| B. Prognosis Capaian Tahun 2019.....  | 9         |
| <b>III RENCANA KERJA TAHUN 2019.....</b>  | <b>11</b> |
| A. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional..           | 11        |
| B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun<br>2019..... | 13        |
| <b>IV PENUTUP.....</b>  | <b>15</b> |
| <b>V LAMPIRAN.....</b>  | <b>16</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan.....            | 5       |
| Gambar 2. Grafik Capaian IKK Pusat Penyuluhan.....             |         |
| Gambar 3. Sebaran capaian IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2018..... | 8       |
| Gambar 4. Penyerapan Anggaran Tahun 2018.....                  | 9       |
| Gambar 5. Lima Prioritas Nasional .....                        | 11      |
| Gambar 6. Prioritas Nasional dan Program Prioritas BP2SDM..... | 12      |

## DAFTAR TABEL

|  | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1. Sebaran Pegawai Pusat Penyuluhan .....  | 6       |
| Tabel 2. Sebaran Capaian IKK Koperasi dan LP2UKS.....  | 7       |
| Tabel 3. Prognosis IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2019.....  | 9       |
| Tabel 4. Prognosis Capaian Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2019.....                       | 10      |
| Tabel 6. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2019 | 13      |

# DAFTAR LAMPIRAN

|  | Halaman |
|--|---------|
| Lampiran 1. Matrik Rencana dan Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2020..... | 16      |

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024, tahun 2020 adalah tahun pertama dalam periode dan menjadi penentu awal dalam mencapai keberhasilan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2020 - 2024. Sebagai tahun awal pelaksanaan RPJMN, penyusunan rencana kerja (renja) tahun 2020 perlu difokuskan pada penyesuaian rencana 5 (lima) tahun ke depan melalui pendekatan perencanaan dan penganggaran yang tematik, holistik, integratif dan spasial, yaitu:

1. Tematik, perencanaan dan penganggaran menggunakan tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Secara Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 mempunyai tema utama “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dilaksanakan dalam Lima Prioritas Nasional;
2. Holistik, perencanaan dan penganggaran merupakan penjabaran tematik dari program Presiden yang dilakukan secara komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/ Lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
4. Spasial, kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Sejalan dengan arah kebijakan perencanaan dan penganggaran tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dalam sasaran pembangunan nasional mendukung 3 dari 5 Prioritas Nasional, yaitu:

1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; 2) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; serta 3) Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup. Kegiatan pada Pusat Penyuluhan sebagai Unit Kerja Eselon II di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM masuk ke dalam Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan.

Dalam rangka mencapai sasaran kebijakan tersebut, Pusat Penyuluhan menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sekaligus mewujudkan pencapaian target prioritas nasional sebagaimana yang telah dijelaskan. Renja Pusat Penyuluhan Tahun 2020 selain berisi penjabaran kegiatan penyuluhan sesuai dengan arahan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada

dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, juga memuat tindak lanjut terhadap pelaksanaan kinerja dan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Dokumen Renja ini terdiri dari Peraturan Kepala Pusat, Pengantar, Pendahuluan, Capaian Sasaran Program Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019, Rencana Kerja Tahun 2020, Penutup dan Lampiran.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan bahwa kedudukan Pusat Penyuluhan yaitu sebagai Eselon II dibawah Eselon I BP2SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pusat Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan. Adapun fungsi dari Pusat Penyuluhan yaitu menyelenggarakan fungsi, meliputi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
2. Penyiapan pelaksanaan tugas pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
4. Bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Pusat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Penyuluhan dibantu oleh 3 Bidang dan 1 Sub Bagian Tata Usaha, yaitu : Bidang Pengembangan Penyuluhan, Bidang Ketenagaan Penyuluhan dan Bidang Kelembagaan Penyuluhan. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang lingkup Pusat Penyuluhan dijelaskan sebagaimana berikut:

### **1. Bidang Pengembangan Penyuluhan**

Bidang Pengembangan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan penyuluhan. Fungsi Bidang Pengembangan Penyuluhan Kehutanan, yaitu:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan;

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan penyuluhan; dan
- c. Bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan penyuluhan.

Bidang Pengembangan membawahi 2 Sub Bidang yaitu Sub Bidang Programa dan Evaluasi serta Sub Bidang Metode dan Materi Penyuluhan dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Sub Bidang Programa dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan program penyuluhan.
- 2) Sub Bidang Metode dan Materi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan metode dan materi penyuluhan.

## 2. Bidang Ketenagaan Penyuluhan

Bidang Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan. Fungsi Bidang Ketenagaan Penyuluhan, yaitu :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan; dan
- c. Bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan.

Bidang Ketenagaan Penyuluhan membawahi 2 Sub Bidang yaitu Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan Aparatur dan Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan Non Aparatur dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan Aparatur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan aparatur di daerah.
- 2) Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan Non Aparatur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan non aparatur di daerah.

### 3 Bidang Kelembagaan Penyuluhan

Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan penyuluhan. Fungsi Bidang Kelembagaan Penyuluhan, yaitu:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan penyuluhan; dan
- c. Bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan penyuluhan.

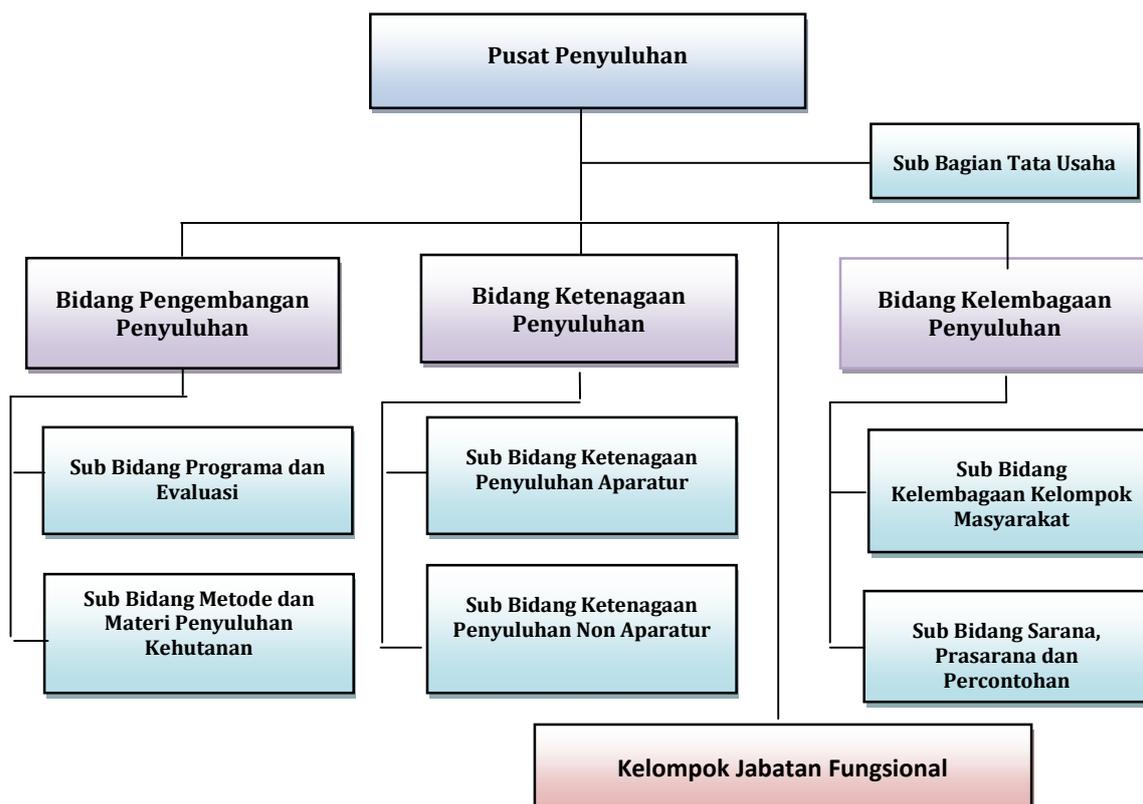
Bidang Kelembagaan Penyuluhan membawahi Sub Bidang Kelembagaan Kelompok Masyarakat dan Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Percontohan Penyuluhan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Sub Bidang Kelembagaan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan kelompok masyarakat.
  - 2) Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Percontohan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan sarana, prasarana dan percontohan penyuluhan.
4. Sub Bagian Tata Usaha yang menjalankan tugas dan fungsi terkait pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat.

Pusat Penyuluhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selain dibantu oleh Bidang dan Sub Bidang juga dibantu oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Struktur Organisasi dan SDM**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan terdiri atas 3 Eselon III, 7 Eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan. Struktur organisasi secara lebih jelas dijelaskan sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan

Jumlah Pegawai Pusat Penyuluhan secara keseluruhan sebanyak 48 orang terdiri dari 40 orang PNS dan 8 orang tenaga kontrak sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Pegawai Pusat Penyuluhan

| NO.                    | Jenjang Pendidikan | GOL. IV |   | GOL. III |    | GOL. II |   | GOL. I |   | JUMLAH |    |     |
|------------------------|--------------------|---------|---|----------|----|---------|---|--------|---|--------|----|-----|
|                        |                    | L       | P | L        | P  | L       | P | L      | P | L      | P  | JML |
| 1.                     | Doktor             | 1       | 1 | -        | -  | -       | - | -      | - | 1      | 1  | 2   |
| 2.                     | Pascasarjana       | 5       | 2 | 4        | 4  | -       | - | -      | - | 9      | 6  | 15  |
| 3.                     | Sarjana            | 1       | 2 | 7        | 8  | -       | - | -      | - | 8      | 10 | 18  |
| 4.                     | Sarjana Muda       | -       | - | -        | -  | 2       | - | -      | - | 2      | -  | 2   |
| 5.                     | SLTA               | -       | - | 2        | -  | -       | - | -      | - | 2      | -  | 2   |
| 6.                     | SLTP               | -       | - | -        | -  | -       | - | -      | - | -      | -  | -   |
| 7.                     | SD                 | -       | - | -        | -  | 1       | - | -      | - | 1      | -  | 1   |
| <b>Jumlah (L+P)</b>    |                    | 7       | 5 | 13       | 12 | 3       | 0 | 0      | 0 | 23     | 17 | 40  |
| <b>Jumlah per Gol.</b> |                    | 12      |   | 25       |    | 3       |   | 0      |   | 40     |    | 40  |

Keterangan : Tenaga Honorer : 8 orang

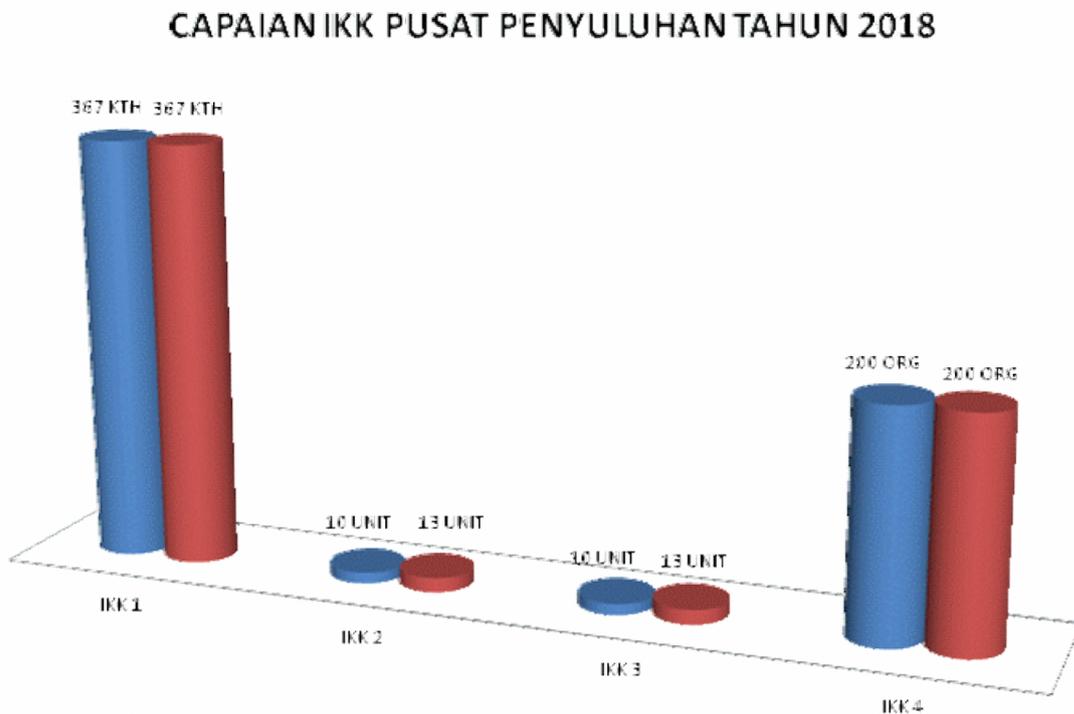
## II. CAPAIAN TAHUN 2018 DAN PROGNOSIS TAHUN 2019

### A. Capaian Tahun 2018

Capaian Kinerja Tahun 2018 memuat capaian indikator kinerja dan penyerapan anggaran pada tahun 2018. Pengukuran capaian dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

#### 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Penyuluhan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan. Pusat Penyuluhan mempunyai empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya; IKK 2. Pembentukan dan pengembangan koperasi; IKK3. Pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) dan IKK4 Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2018 dijelaskan sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2. Grafik Capaian IKK Pusat Penyuluhan

Rata-rata capaian kinerja IKK Pusat penyuluhan adalah sebesar 115%, diperoleh dari rata-rata presentase perbandingan antara target dan realisasi empat IKK. IKK 1 Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, target capaian IKK pada

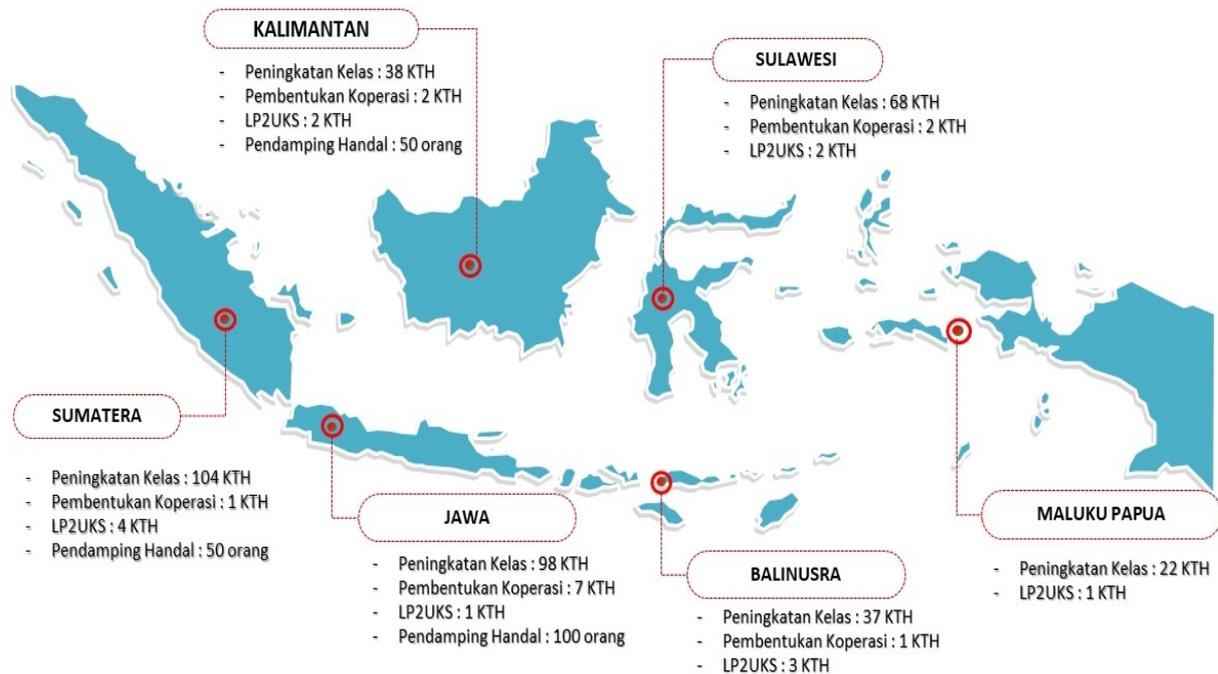
tahun 2018, sebanyak 367 KTH. Target ini tercapai sebanyak 367 KTH atau 100% yang tersebar di 32 provinsi dan 166 Kabupaten di Seluruh Indonesia dengan mayoritas peningkatan kelas KTH terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Lampung; IKK 2 pembentukan dan pengembangan koperasi, pada tahun 2018 telah terbentuk 13 unit koperasi dari target yang telah ditetapkan sebanyak 10 unit atau tercapai sebesar 130%. IKK 3 pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), pada tahun 2018 jumlah LP2UKS yang terbentuk sebanyak 13 unit dari target 10 unit atau tercapai sebesar 130%. Rincian capaian IKK 1 dan IKK 2 tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran Capaian IKK Koperasi dan LP2UKS

| No           | Provinsi           | Jumlah Koperasi KTH | Jumlah LP2UKS |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 1            | Bengkulu           | 1                   | 1             |
| 2            | Jambi              | -                   | 2             |
| 3            | Bangka Belitung    | -                   | 1             |
| 4            | Banten             | 1                   | -             |
| 5            | Jawa Barat         | 1                   | -             |
| 6            | Jawa Tengah        | 2                   | -             |
| 7            | DI Yogyakarta      | 2                   | -             |
| 8            | Jawa Timur         | 1                   | 1             |
| 9            | Bali               | -                   | 1             |
| 10           | NTB                | 1                   | 1             |
| 11           | NTT                | -                   | 1             |
| 12           | Kalimantan Tengah  | 1                   | 1             |
| 13           | Kalimantan Selatan | 1                   | -             |
| 14           | Kalimantan Timur   | -                   | 1             |
| 15           | Sulawesi Utara     | -                   | 1             |
| 16           | Sulawesi Tengah    | 1                   | 1             |
| 17           | Gorontalo          | 1                   | -             |
| 18           | Maluku Utara       | -                   | 1             |
| <b>Total</b> |                    | <b>13</b>           | <b>13</b>     |

IKK 4 peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam pendampingan perhutanan sosial. Kegiatan ini difokuskan pada peran penyuluh dalam pendampingan masyarakat/ kelompok Pemegang Ijin dalam mendukung Percepatan Program Perhutanan Sosial. Peningkatan kapasitas pendamping perhutanan sosial dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu BDLHK Kadipaten, BDLHK Bogor dan Provinsi Kalimantan Selatan. Target IKK 4 pada tahun 2018 sejumlah

200 orang dan tercapai sebanyak 200 orang (100%). Sebaran capaian IKK Pusat Penyuluhan dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Sebaran capaian IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2018

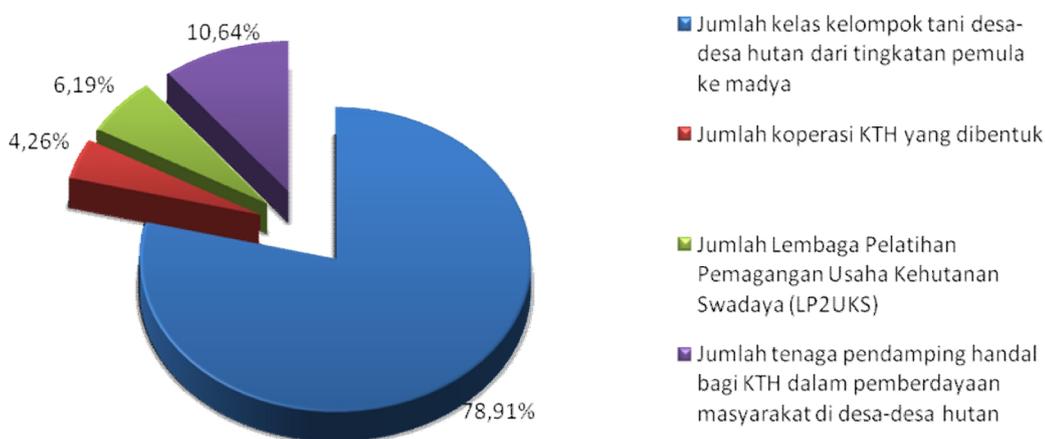
IKK 1 Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya dan IKK 4 Peningkatan kapasitas tenaga pendamping/penyuluh handal bagi KTH merupakan Prioritas Nasional. IKK : Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya termasuk ke dalam Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan, Program Prioritas Nasional : Peningkatan Daya Saing UMKM dan Operasi, Kegiatan Prioritas Nasional : Perluasan Akses Pembiayaan dan Proyek Prioritas Nasional : Peningkatan Modal Usaha bagi KUMKM dan Kelompok Usaha. Sedangkan, IKK : Peningkatan kapasitas tenaga pendamping/penyuluh handal bagi KTH termasuk ke dalam Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah dengan Program Prioritas Nasional : Pembangunan Perdesaan, Kegiatan Prioritas Nasional : Pengelolaan SDA Desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan, Proyek Prioritas Nasional : Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan.

## 2. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2018

Total Anggaran (Pagu) pada Pusat Penyuluhan Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 10.854.600.000,- (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang tertuang pada dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Satuan Kerja Pusat Penyuluhan sesuai dengan Surat Pengesahan Nomor: SP DIPA-029.08.1.400206/2019 tanggal 5 Desember 2018, dengan realisasi sebesar Rp

10.853.254.853,- (Sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga) atau sebesar 99.99%. Capaian serapan anggaran Pusat Penyuluhan tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 4.

### PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018



Gambar 4. Penyerapan Anggaran Tahun 2018

### B. Prognosis Capaian Tahun 2019

Prognosis Capaian Tahun 2019 memuat prediksi capaian indikator kinerja dan penyerapan anggaran pada tahun 2019.

#### 1. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019

Prognosis capaian IKK Pusat Penyuluhan sampai dengan bulan Desember 2019 diharapkan memenuhi target yang telah ditetapkan. Prognosis capaian IKK secara lebih jelas disajikan sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Prognosis IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2019

| Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)  | Satuan | Target | Prognosis s/d/Des | % Capaian |
|---|--------|--------|-------------------|-----------|
| Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya                 | KTH    | 110    | 110               | 100,00    |
| Jumlah koperasi KTH yang dibentuk   | KTH    | 20     | 20                | 100,00    |
| Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)                      | KTH    | 20     | 20                | 100,00    |
| Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan | Orang  | 200    | 200               | 100,00    |
| Prognosis IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2019   |        |        |                   | 100,00    |

## 2. Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2019

Prognosis capaian serapan anggaran Pusat Penyuluhan sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebesar Rp. 10.759.524.700 (99,94%). Prognosis serapan anggaran dijelaskan sebagaimana pada Tabel 4.

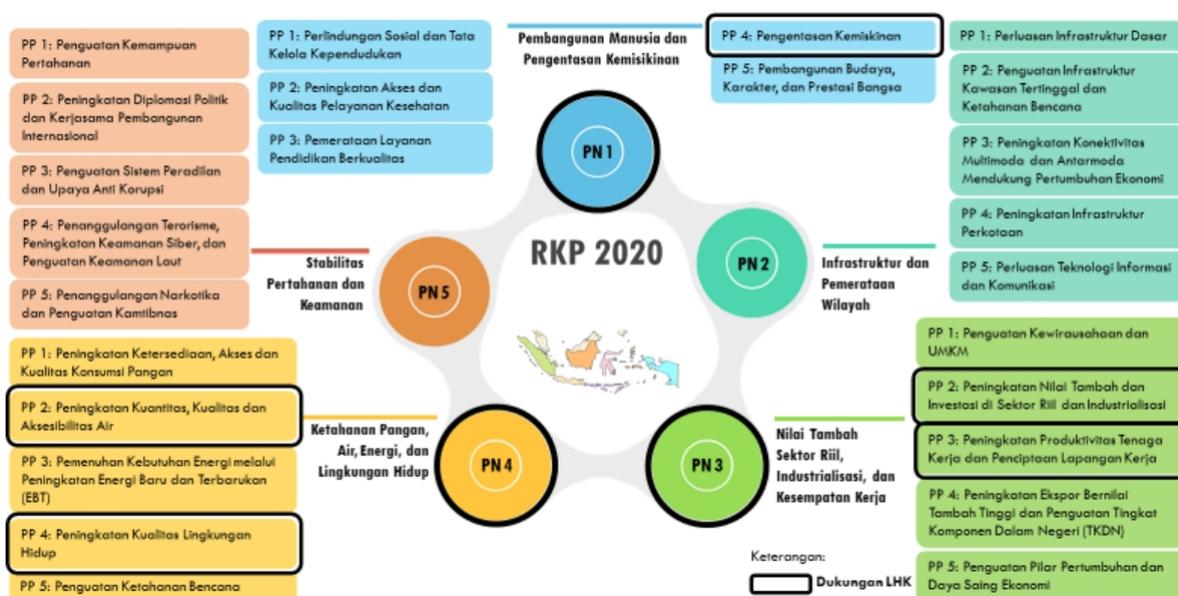
Tabel 4. Prognosis Capaian Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2019

| <b>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)</b>   | <b>Pagu</b>           | <b>Prognosis s/d/Des</b> | <b>% Capaian</b> |
|---|-----------------------|--------------------------|------------------|
| Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya                 | 7.125.500.000         | 7.121.224.700            | 99,94            |
| Jumlah koperasi KTH yang dibentuk   | 920.000.000           | 919.400.000              | 99,93            |
| Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)                      | 920.000.000           | 919.400.000              | 99,93            |
| Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan | 1.800.000.000         | 1.799.500.000            | 99,97            |
| <b>Prognosis Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2019</b>                             | <b>10.765.500.000</b> | <b>10.759.524.700</b>    | <b>99,94</b>     |

### III. RENCANA KERJA TAHUN 2020

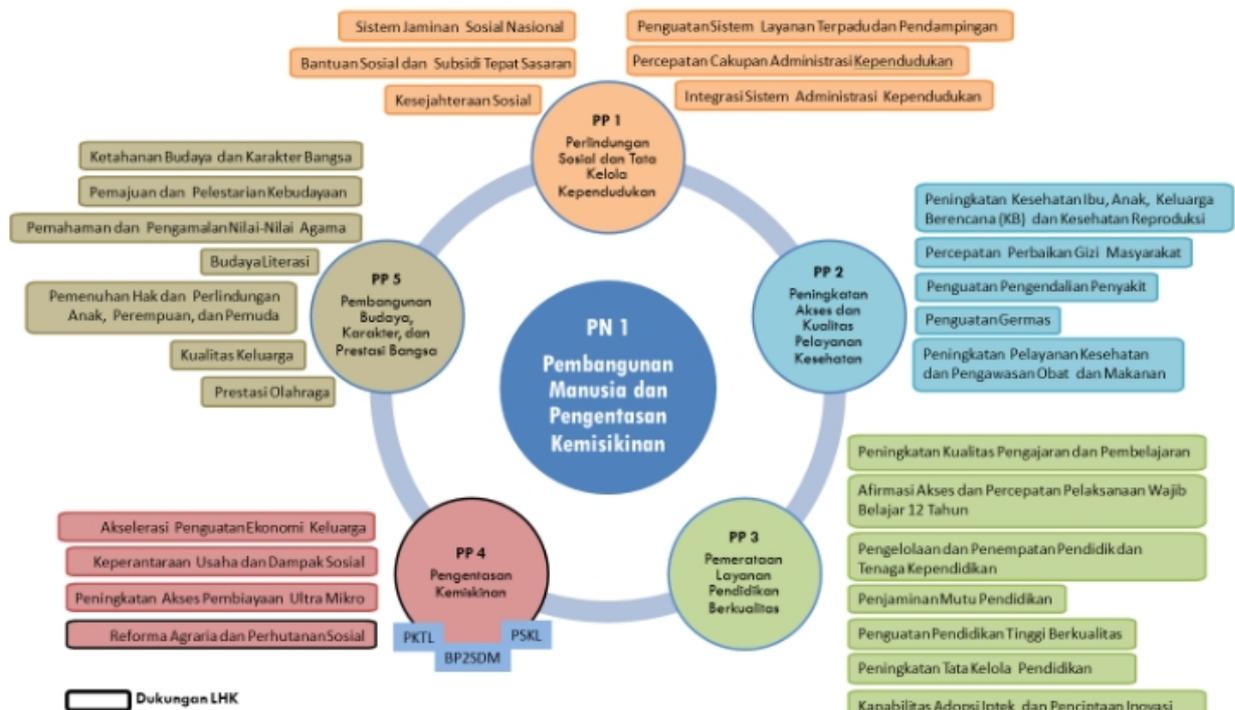
#### A. Strategi dalam Mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Program Prioritas Nasional

Berdasarkan RKP 2020, Pemerintah telah menetapkan 5 prioritas nasional dalam rangka meningkatkan efisiensi serta memaksimalkan ketersediaan anggaran nasional untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional. Penjelasan 5 Prioritas Nasional sebagaimana Gambar 5.



Gambar 5. Lima Prioritas Nasional

Kegiatan Pusat Penyuluhan dalam kerangka pembangunan nasional termasuk ke dalam Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, Proyek Prioritas Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan Prioritas Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, Proyek Prioritas Nasional Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan Masyarakat dalam usaha perhutanan sosial. Kegiatan Pusat Penyuluhan dalam kerangka pembangunan nasional secara lebih jelas dapat dilihat sebagaimana Gambar 6.



Gambar 6. Prioritas Nasional dan Program Prioritas BP2SDM

Pusat Penyuluhan dalam mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Program Prioritas Nasional melaksanakan kegiatan yang diukur dengan tersedianya 200 orang pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok masyarakat, terbentuk dan berkembangnya 120 unit Kelompok Tani Hutan Mandiri dan tersedianya 4 jenis metode penyuluhan kehutanan yang diimplementasikan. Selanjutnya, strategi yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas penyuluh aparatur dan non aparatur.
  - Mengidentifikasi potensi dan kebutuhan dalam meningkatkan kapasitas Penyuluh Kehutanan.
  - Meningkatkan kapasitas Penyuluh Kehutanan dalam rangka mendukung program pembangunan kehutanan (Hutan Sosial, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, TORA, gambut, KPH, Kemitraan Konservasi dan pembangunan kehutanan lainnya).
  - Membangun kesepahaman dan meningkatkan sinergitas pendampingan bersama antara Penyuluh PNS, PKSM dan Penyuluh Kehutanan Swasta dalam mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Memantapkan aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha untuk KTH.
  - Memantapkan aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha pelaku utama melalui fasilitasi KTH Mandiri.
  - Memperkuat usaha pelaku utama melalui fasilitasi pembentukan dan pengembangan koperasi KTH serta temu usaha.

- Memperluas akses teknologi tepat guna melalui fasilitasi Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS dan pemagangan.
3. Mengimplementasikan metode dan materi penyuluhan.
- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan KTH melalui sekolah lapang
  - Peningkatan sistem monitoring kegiatan penyuluhan melalui pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi SIMPING).
  - Penyusunan materi penyuluhan sesuai program prioritas KLHK dan kebutuhan sasaran penyuluhan.
  - Pengembangan metode penyuluhan dalam mendukung pembangunan KLHK.

## B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2020

Pusat Penyuluhan tahun 2020 memiliki kegiatan, sasaran kegiatan, unit kegiatan dan elemen kegiatan seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2019

| Program/<br>Kegiatan  | Sasaran<br>Kegiatan  | Indikator Kegiatan  | Unit Kegiatan  | Elemen Kegiatan   |
|---|--|---|--|---|
| <b>Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</b>              |  |   |  |   |
| Peningkatan<br>Penyuluhan                                       | Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat | Pendamping Kompeten dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui KTH/Kelompok Masyarakat (200 orang) (PN1, PP4, KP4, Pro-PN 7) | Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan menjadi Kompeten ( Penyuluh Handal) | Identifikasi Potensi dan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan |
|   |  |   |  | Penyusunan dan Penggandaan Modul Pembelajaran                               |
|   |  |   |  | Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara              |
|   |  |   |  | Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Sumatera                             |
|   |  |   |  | Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Kalimantan                           |
|   |  |   |  | Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Sulawesi                             |
|   |  |   |  | Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Maluku - Paapua                      |
|   |  |   | Ketenagaan Penyuluhan Non Aparatur   | Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluh Kehutanan Non Aparatur        |
|   |  |   |  | Fasilitasi Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional                             |
|   |  |   |  | Munas dan Temu Teknis Ketenagaan Penyuluh Non Aparatur                      |
| Kelompok Tani Hutan Mandiri (120 KTH) (PN1, PP4, KP4, Pro-PN 7) | Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kelola Kelembagaan,                                | Pendampingan Kelompok Tani Desa-desanya Hutan Menuju KTH Mandiri  |  |   |
|   |  | Fasilitasi Pengembangan Koperasi  |  |   |

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran<br>Kegiatan | Indikator Kegiatan   | Unit Kegiatan                                   | Elemen Kegiatan   |
|----------------------|---------------------|--|---|---|
|                      |                     |  | Kawasan dan Usaha                               | Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya<br>Pemagangan Pengurus KTH Mandiri<br>Monitoring dan Evaluasi KTH Mandiri  |
|                      |                     | Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan yang Diimplementasikan (4 Metode) | Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan          | Sekolah Lapang<br>Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2020<br>Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari 2020<br>Penyebarluasan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik<br>Penerbitan Majalah Kenari  |
|                      |                     | Layanan Dukungan Manajemen (1 Layanan)                                   | Penyusunan Rencana program dan Rencana Anggaran | Penyusunan Dokumen RENSTRA Penyuluhan 2020 – 2024<br>Penyusunan Dokumen Renja Pusat Penyuluhan 2021<br>Penyusunan Dokumen RKAKL Pusat Penyuluhan 2021<br>Penyusunan Programa Penyuluhan   |
|                      |                     |  | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi             | Penyusunan LKj Satker PUSLUH Tahun 2019<br>Laporan Satker Pusat Penyuluhan ( Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan)<br>Evaluasi BMN Pusat Penyuluhan<br>Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Administrasi<br>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan |
|                      |                     |  | Pelayanan Umum dan Perlengkapan                 | Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan  |

## **IV.PENUTUP**

Pada tahun 2020 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; serta Ketahanan Pangan, Air Energi dan Lingkungan Hidup. Kegiatan pada Pusat Penyuluhan termasuk ke dalam Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Pusat Penyuluhan dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional melaksanakan kegiatan yang diukur dengan tersedianya 200 orang pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok masyarakat, terbentuk dan berkembangnya 120 unit Kelompok Tani Hutan Mandiri dan tersedianya 4 jenis metode penyuluhan kehutanan yang diimplementasikan.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Pusluh Tahun 2020 ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2020 sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar.



# LAMPIRAN

**Lampiran 1. Matrik Rencana dan Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2020**

| Indikator Kegiatan  | Unit Kegiatan  | Sasaran Kegiatan   | Elemen Kegiatan   | Target  | Lokasi (s/d Kabupaten) | Pagu Alokasi (Rupiah)   |               |
|---|--|--|---|---|------------------------|---|---------------|
| Pendamping Kompeten dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui KTH/Kelompok Masyarakat (200 orang) (PN1, PP4, KP4, Pro-PN 7) | Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan menjadi Kompeten ( Penyuluh Handal) | Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat | Identifikasi Potensi dan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan | 200 Orang   | Pusat                  | 2.000.000.000   |               |
|   |  |  | Penyusunan dan Penggandaan Modul Pembelajaran                               |   | Pusat                  |   |               |
|   |  |  | Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara              |   | Pusat                  |   |               |
|   |  |  | Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Sumatera                             |   | Pusat                  |   |               |
|   |  |  | Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Kalimantan                           |   | Pusat                  |   |               |
|   |  |  | Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Sulawesi                             |   | Pusat                  |   |               |
|   |  |  | Temu Teknis Penyuluh Kahutanan Wilayah Maluku - Paapua                      |   | Pusat                  |   |               |
|   |  |  | Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluh Kehutanan Non Aparatur        |   | Pusat                  |   | 1.200.000.000 |
|   | Fasilitasi Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional                              | Pusat  |   |   |                        |   |               |
|   | Munas dan Temu Teknis Ketenagaan Penyuluh Non Aparatur                       | Pusat  |   |   |                        |   |               |
|   | Kelompok Tani Hutan Mandiri (120 KTH) (PN1, PP4, KP4, Pro-PN 7)              | Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kawasan dan Usaha              |   | Pendampingan Kelompok Tani Desa-desa Hutan Menuju KTH Mandiri | 120 KTH                | Bener Meriah, Aceh Barat<br>Simalungun, Padang lawas Utara<br>Pasaman, Solok Selatan<br>Indragiri Hilir, Bengkalis<br>Belitung Timur, Bangka<br>Batam, Kota Tanjung Pinang<br>Tanjung Jabung Timur, Kerinci<br>Muara Enim, rejang Lebong<br>Tanggamus, Lampung Barat,<br>Lampung Timur, Lampung Utara | 4.100.000.000 |

| Indikator Kegiatan | Unit Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Elemen Kegiatan | Target | Lokasi (s/d Kabupaten)  | Pagu Alokasi (Rupiah) |
|--------------------|---------------|------------------|-----------------|--------|---|-----------------------|
|                    |               |                  |                 |        | Mesuji<br>DKI Jakarta<br>Cianjur, Subang, Sukabumi,<br>Pangandaran, Bandung Barat<br>Bandung, Garut, Tasikamalaya<br>Ciamis, Sumedang, Kuningan<br>Cirebon<br>Banten, Pandeglang, serang, lebak<br>Blora, Grobogan, Jepara, Kudus,<br>Demak<br>Kab. Pekalongan, Kab. Tegal, Kab.<br>Pemalang, Kab. Cilacap, Kab.<br>Banjarnegara, Kab. Purbalingga<br>Kab. Kebumen, Kab. Temanggung<br>Kab. Sragen, Kab. Rembang, Kab.<br>Pati, Kab Brebes, Kab Banyumas,<br>Kab Wonosobo, Kab Purworejo,<br>Kab Magelang, Kab Wonogiri<br>Sleman, Kulonprogo,<br>Gunungkidul, Bantul;<br>Situbondo, Jombang, Ngawi,<br>Kediri, Blitar, Banyuwangi;<br>Badung, Gianyar;<br>Lombok Utara, Sumbawa<br>flores Timur, Timor Tengah Utara<br>Sintang, Ketapang<br>Barito Hulu, Tabalong<br>Kota Baru, Bulungan<br>Nunukan, Kota Bontang<br>Kutai Kartanegara<br>Bolaang Mongondow, Tomohon<br>Majene, Polewali Mandar<br>Bombana, Buton<br>Tanah Toraja, Palopo, Toli-Toli<br>Buol |                       |

| Indikator Kegiatan | Unit Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Elemen Kegiatan                                 | Target | Lokasi (s/d Kabupaten)   | Pagu Alokasi (Rupiah) |
|--------------------|---------------|------------------|---|--------|--|-----------------------|
|                    |               |                  |   |        | Kab Gorontalo<br>Kab Boalemo<br>Kota Ambon, Kab Maluku Tengah,<br>Maluku Utara;<br>Kota Ternate;<br>Raja Ampat, Manokwari<br>Kab Jayapura  |                       |
|                    |               |                  | Fasilitasi Pengembangan Koperasi                |        | 1. Kabupaten Bener Meriah,<br>2. Kabupaten Kerinci Provinsi<br>3. Kabupaten Lampung Timur<br>4. Kabupaten Sukabumi<br>Provinsi<br>5. Kabupaten Karanganyar<br>6. Kabupaten Bantul<br>7. Kabupaten Pasuruan<br>8. Kabupaten Bima<br>9. Kabupaten Bolaang<br>Mongondow<br>10. Kabupaten Konawe |                       |
|                    |               |                  | Fasilitasi Pembentukan<br>Wanawiyata Widyakarya |        | 1. Kabupaten Padang Lawas<br>Utara<br>2. Kabupaten Solok Selatan,<br>3. Kabupaten Lampung Barat<br>4. Kabupaten Cianjur<br>5. Kabupaten Serang<br>6. Kabupaten Klaten<br>7. Kabupaten Sleman<br>8. Kabupaten Blitar<br>9. Kabupaten Tabanan<br>10. Kabupaten Tabalong                        |                       |
|                    |               |                  | Pemagangan Pengurus KTH<br>Mandiri              |        | Pusat  |                       |
|                    |               |                  | Monitoring dan Evaluasi KTH<br>Mandiri          |        | Pusat  |                       |

| Indikator Kegiatan   | Unit Kegiatan                                   | Sasaran Kegiatan | Elemen Kegiatan   | Target    | Lokasi (s/d Kabupaten)   | Pagu Alokasi (Rupiah) |
|--|---|------------------|---|-----------|--|-----------------------|
| Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan yang Diimplementasikan (4 Metode) | Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan          |                  | Sekolah Lapang  | 4 Metode  | Lampung, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan | 3219500000            |
|  |   |                  | Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2020                                   |           | Pusat  |                       |
|  |   |                  | Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari 2020                               |           | Pusat  |                       |
|  |   |                  | Penyebarluasan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik               |           | Pusat  |                       |
|  |   |                  | Penerbitan Majalah Kenari   |           | Pusat  |                       |
| Layanan Dukungan Manajemen (1 Layanan)                                   | Penyusunan Rencana program dan Rencana Anggaran |                  | Penyusunan Dokumen RENSTRA Penyuluhan 2020 – 2024                         | 1 Layanan | Pusat  | 367.000.000           |
|  |   |                  | Penyusunan Dokumen Renja Pusat Penyuluhan 2021                            |           | Pusat  |                       |
|  |   |                  | Penyusunan Dokumen RKAKL Pusat Penyuluhan 2021                            |           | Pusat  |                       |
|  |   |                  | Penyusunan Programa Penyuluhan  |           | Pusat  |                       |
|  | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi             |                  | Penyusunan LKj Satker PUSLUH Tahun 2019                                   |           | Pusat  | 838.525.000           |
|  |   |                  | Laporan Satker Pusat Penyuluhan ( Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan) |           | Pusat  |                       |
|  |   |                  | Evaluasi BMN Pusat Penyuluhan   |           | Pusat  |                       |
|  |   |                  | Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Administrasi                               |           | Pusat  |                       |
|  |   |                  | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan                               |           | Pusat  |                       |
|  |   |                  | Pelayanan Umum dan Perlengkapan   |           | Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan                             |                       |